



# Penipuan Bermodus Aktivasi IKD Marak

## ■ Pemkot Yogya Keluarkan SE untuk Kewaspadaan Publik

**YOGYA. TRIBUN** - Pemkot Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pencegahan penipuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). SE tertanggal 1 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Sekda Aman Yuridialjaya tersebut, dikeluarkan sebagai respons atas maraknya penipuan akhir-akhir ini.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki, menuturkan, pihaknya masih mendapati banyak aduan terkait penipuan itu. Rata-rata nomor tidak dikenal yang menghubungi masyarakat mengaku sebagai pegawai Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta, atau pegawai kementerian.

"Kalau korban (dengan kerugian materi) tidak ada lagi, hanya saja yang dihubungi masih banyak. Kami tidak tahu, mereka dapat data dari mana," ujarnya, Rabu (9/7).

Menurutnya, modus penipuan tersebut, terakhir kali memakan korban seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Yogyakarta pada kisaran Mei 2025 silam. Saat itu, korban terpedaya setelah mengakses tautan yang dikirimkan si penipu, dan berdampak uang Rp1 juta di rekeningnya ludes seketika.

"Modusnya sama, mereka (korban) diminta datang ke Kantor Disdukcapil. Tapi, supaya tidak antri, mereka

**CEGAH PENIPUAN**

- Pemkot Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pencegahan penipuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- SE tertanggal 1 Juli 2025 merupakan respons atas maraknya penipuan akhir-akhir ini.
- Masyarakat diminta tidak membagikan data pribadi.

**Modusnya sama, mereka (korban) diminta datang ke Kantor Disdukcapil. Tapi, supaya tidak antri, mereka dikasih link, kalau sampai dibuka, ya habis uangnya.**

dikasih link, kalau sampai dibuka, ya habis uangnya," ujar Septi.

"Korban terakhir, ya yang beberapa waktu lalu, yang kehilangan Rp1 juta. Korban lainnya di luar Kota Yogya, ada beberapa itu, ada yang sampai Rp7 juta, bahkan Rp17 juta," urainya.

SE tersebut menegaskan, Dinas Dukcapil tidak pernah menghubungi masyarakat

melalui whatsapp, SMS, dan telepon yang ditujukan secara personal untuk melakukan aktivasi IKD.

Proses aktivasi IKD hanya dilakukan secara tatap muka di Dinas Dukcapil, Mal Pelayanan Publik (MPP) atau tempat pelayanan resmi lainnya.

"arena tidak mungkin kami menghubungi per orang seperti itu. Lagipula, aktivasi IKD tidak memerlukan verifikasi data melalui telepon atau WhatsApp," tandasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan pantauan Tribun Jogja, SE No 100.3.4/2378 Tahun 2025 tersebut sudah beredar masif melalui grup-grup WhatsApp masyarakat.

Salah satu poin surat edaran mengimbau warga mengabaikan jika ada telepon, video call, dan chat yang mengatasnamakan Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta terkait aktivasi IKD. Lalu, masyarakat diminta tidak membagikan data pribadi, yang akan berdampak pada pencurian identitas, penipuan finansial, dan penyalahgunaan data," ucap Septi. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005